

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata, namun memiliki peran yang besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua golongan, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.¹

Masalah-masalah mengenai hak milik intelektual dalam bentuk hak cipta dan hak atas kekayaan industri tentu saja menarik perhatian. Isu tersebut menuntut perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual sehingga Indonesia harus ikut andil dalam hal perlindungan hukum. Sebagai upaya dalam mencari keselarasan standar Internasional Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia telah meratifikasi lima konvensi internasional seperti Paris Covention For Protection of Industry (PCT), Trademark Law Treaty, Berne

Convention, WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty.²

Ciri khas dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak privat (*private rights*), yaitu hak yang membuat seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya ataupun tidak. Negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada para inventor, pencipta, pendesain, dan lain-lain sebagai para pelaku Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya yang telah dibuat dan agar orang lain terinspirasi untuk dapat melanjutkan dan mengembangkan lagi karya tersebut.

Dalam dunia bisnis, setiap orang atau perusahaan akan sangat memperhatikan pentingnya sebuah nama atau simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Nama atau simbol tersebut akan membantu untuk menunjukkan asal barang atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).³

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*a guarantee*

² <https://www.antaranews.com> diakses pada 26 Desember 2019

³Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integritas Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 3

of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁴

Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek.⁵ Suatu merek yang dibuat kemudian dengan usaha pemasaran yang baik dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama akan melahirkan reputasi yang baik dan jaminan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, merek yang memiliki reputasi baik dan terkenal akan berimbas pada aset atau kekayaan perusahaan yang akan terus bertambah.

Dalam perkembangannya, merek dagang yang didaftarkan seringkali hanya berupa nama orang, singkatan, akronim, atau tanpa memiliki makna harfiah sama sekali. Sebagai contoh merek dagang terkenal asal Indonesia, seperti Wardah, Indomie, J.Co, Bucerri, GO-JEK pun bukanlah merek yang berasal dari kosakata Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.⁶

Untuk melindungi merek tersebut tentu diperlukan adanya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak milik atas merek, baik

⁴Ibid.,

⁵ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97

⁶ <https://www.tribunnews.com>. Diakses tanggal 8 November 2019

itu ketentuan yang mengatur tentang teknis pendaftaran atau ketentuan tentang kriteria merek yang dapat didaftarkan. Di Indonesia salah satu ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang disahkan pada tanggal 30 September 2019 lalu. Peraturan Presiden ini merupakan amanat dari pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ini diantaranya mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang wajib digunakan pada merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam pasal 5 bahwa :

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- 2) Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing
- 3) Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.
- 4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.
- 5) Pencantuman Bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai merek sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut setidaknya memuat mengenai upaya perlindungan terhadap pemilik merek serta merek yang bersangkutan dalam rangka kegiatan usaha. Selain itu, dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai perlindungan terhadap Indikasi Geografis, yang mana merupakan perlindungan terhadap potensi nasional yang akan menjadi komoditas unggulan mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Beberapa contoh potensinya adalah seperti Kopi Gayo, Kopi Kintanami Bali, Lada Hitam Lampung, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Gerabah Kasongan dan masih banyak lagi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut sebenarnya telah mengatur tentang bagaimana kriteria merek yang dapat didaftarkan sehingga dapat dilindungi. Seperti contoh merek yang dapat memperoleh perlindungan adalah merek yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dimensi, suara, hologram, atau terdiri dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merumuskan bahwa :

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Melihat ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang yang diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia tidaklah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian diatas yang memaparkan bahwa terdapat dua aturan hukum mengenai penggunaan bahasa pada merek dagang yang berbeda, dimana isi pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mewajibkan merek dagang menggunakan bahasa Indonesia, sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mewajibkan penggunaan bahasa tertentu pada merek.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan ketentuan penggunaan bahasa pada merek dagang. Yang kemudian menimbulkan kebingungan baik bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang memproses suatu permohonan pendaftaran dan perpanjangan merek, dan juga bagi masyarakat mengenai ketentuan merek yang mana yang hendaknya dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan penggunaan bahasa suatu merek untuk kemudian didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar dapat didaftarkan dan diperpanjang untuk memperoleh perlindungan hukumnya. Selain itu, juga dengan adanya ketentuan tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang akan berakibat pada nasib merek dagang berbadan hukum Indonesia yang sudah terlanjur menggunakan bahasa asing.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menimbulkan konflik hukum mengenai ketentuan penggunaan bahasa pada merek dagang. Hal tersebut disebabkan ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan yang bertentangan tersebut juga akan berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum. Sementara tujuan hukum itu sendiri salah satunya adalah kepastian hukum yang berarti bahwa adanya aturan yang bersifat umum yang akan membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dimana peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan diatur secara jelas dan pasti.

Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka penulis akan membahas dalam penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS MEREK DAGANG SETELAH TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penggunaan bahasa pada merek dagang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak milik atas merek dagang setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Ketentuan terkait dengan penggunaan bahasa pada merek dagang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak milik atas merek dagang setelah terbitnya Peraturan Presiden 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ditinjau dari perspektif kepastian hukum

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk penulis mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hal penggunaan bahasa dalam pendaftaran merek dagang. Disamping itu manfaat penulisan penelitian ini secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir.

2. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hal penggunaan bahasa dalam pendaftaran merek dagang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ketentuan terkait pendaftaran merek dagang.

E. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap hak milik atas merek ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal ini mengarah kepada pengetahuan mengenai ketentuan perundang-undangan mana yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal menentukan tanda sebuah merek untuk barang atau jasa yang diproduksinya. Sehingga dengan

adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan masyarakat sebagai pemilik hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek.

F. Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang mana juga membutuhkan beberapa terapan ilmu lainnya untuk memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah. Selain itu juga dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta hubungan tersebut.⁷

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁸ Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁷ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum* (cetakan keempat), Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 18

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Peneltian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 112

permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Penelitian Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan yang nyata.⁹

Tahapan pertama untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Untuk metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 13-14.

tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dimana peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, teori-teori atau doktrin yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan memudahkan dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana, Hlm.177

¹¹ Ngobrolin Hukum, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses tanggal 8 Desember 2019

membantu penulis untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.¹²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁴ yakni penulisan yang berdasarkan data-data yang dijadikan obyek penulisan yang kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, yakni cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga menganalisis data yang diperoleh dengan metode

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hlm.392

penelitian terhadap sistematika hukum yaitu Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang sebagai penjelasan serta pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya perumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan dibahas dan diteliti. Adapun selanjutnya terdapat Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan Sistematika Penulisan untuk mempermudah penyusunan penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang digunakan untuk melandasi penulisan ini yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang

¹⁵ Indah Cesia Alfianurahman, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology (Peer To Peer Landing) Di Indonesia*, <http://eprints.umm.ac.id> diakses tanggal 8 Desember 2019

dibahas, serta tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang perlindungan hukum dan juga teori kepastian hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Dalam bab ini akan menjelaskan tahapan penyelesaian yang muncul. Dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Pemaparan diperoleh daripada hasil analisa berdasarkan literatur dan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini, dimana berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Selain itu akan berisi pula mengenai saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian, dan juga berisi rekomendasi sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.